

Kepentingan Jepang Melalui JICA Terhadap Pemberian Bantuan Proyek DSDP di Indonesia

Bianda Evania Tular¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Anak Agung Bagus Surya Widyaugraha³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: biandabi@gmail.com¹⁾, rainypriadarsini@gmail.com²⁾, aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study was made after an issue about Japan's interests through JICA (Japan International Cooperation Agency) with the loan aid to Indonesia in DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) Project Bali, Indonesia. DSDP is the first sanitation project in Indonesia that the research was conducted by JICA and the loan aid was given from Japan. This mega project could say as one of many ways to accomplish Japan's interest in Indonesia. Many reasons make this research happen, some of them are the difference of Indonesia's respond to both of the ex-colonial country, Netherland and Japan, through the aid project and also JICA persuasive approach that becoming suspicious if there is a bigger reason behind this realization of this project. The goals of this study is to show the reader about Japan's interest clearly by the realization of this project.

Keywords :JICA, DSDP, National Interest, aid, state agency

1. PENDAHULUAN

Jepang dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki hubungan kerjasama yang erat. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang merupakan kerjasama di berbagai sektor, beberapa sektor kerjasama antara lain dari kerjasama politik dan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi merupakan kerjasama yang paling signifikan, karena relasi Jepang dan Indonesia sering kali disebut relasi bisnis, yang dapat pula dikatakan kerjasama ekonomi, karena kerjasama ekonomi merupakan kerjasama yang melibatkan adanya transfer uang dan keuntungan diantara kedua belah pihak. Pemberian bantuan merupakan salah

salah satu bentuk dari *development cooperation* yang merupakan salah satu bentuk dari kerja sama ekonomi (Whittemore, n.a). Jepang merupakan negara yang aktif dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia. Pemberian bantuan dianggap sebagai suatu langkah yang baik bagi negara penerima bantuan. Namun tanpa disadari, aktivitas bantuan itu juga menyimpan maksud tertentu dari pemberi bantuan. Dalam hal ini, secara normatif tentu penerima bantuan akan memperoleh keuntungan tanpa melihat motif yang dibawa oleh pemberi bantuan itu sendiri.

Jepang melalui *state agency* atau agensi pemerintah Jepang yakni JICA (*Japan International Cooperation Agency*) melakukan

pemberian bantuan dalam realisasi proyek DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*). Proyek DSDP adalah salah satu proyek hasil bantuan JICA dari sekian banyak proyek infrastruktur di Indonesia. Proyek DSDP telah dicanangkan sejak 1991 dan tahap realisasi dimulai pada tahun 2004. DSDP sendiri merupakan proyek pengolahan limbah rumah tangga maupun industri menjadi air bersih. Selain itu, adanya proyek DSDP juga diyakini mampu mengatasi permasalahan sanitasi di Bali. Proyek DSDP dijalankan di dua kabupaten utama di Bali, yakni Denpasar dan Badung, sebagai kota pusat pariwisata dan pemerintahan di Bali (Suardana, 2011). Realisasi dari kerjasama ini juga merupakan salah satu bagian dari adanya kebijakan luar negeri Jepang atau ODA (*Official Development Assistance*) yang mana ODA ini turut membantu dalam penyuksesan pembangunan yang ada di negara-negara berkembang yang merupakan sahabat Jepang (Akira & Shimomura, 1998).

DSDP merupakan proyek sanitasi berkelanjutan pertama di Indonesia, yang dalam proses realisasinya dibantu oleh bantuan dari Jepang. Adanya faktor kedekatan dengan publik, yang mana, pelaksanaan proyek DSDP berada di tengah masyarakat disadari kehadiran juga manfaatnya oleh masyarakat, namun belum banyak tulisan yang memaparkan tentang keuntungan yang didapat Jepang dari proyek ini. Keuntungan yang didapat oleh Jepang tentunya merupakan perwujudan dari kepentingan Jepang itu sendiri, sehingga proyek ini dipilih sebagai

bahan dalam melihat kepentingan Jepang di Indonesia yaitu di Bali melalui bantuan dalam perealisasi sebuah proyek infrastruktur.

Penelitian ini mengangkat sisi lain dari isu ini dengan memaparkan lebih dalam dan mengacu pada apa saja yang menjadi motif Jepang dibalik pemberian bantuan ini. Pemaparan yang dilakukan pada tulisan ini diharapkan mampu mengemukakan hal-hal yang menjadi keuntungan bagi Jepang yang tidak terungkap oleh publik secara umum, dimana publik secara umum hanya mengetahui realisasi proyek ini secara apa yang terlihat dari berjalannya proyek ini, tanpa mengetahui adanya kepentingan yang menjadi acuan dalam perealisasi proyek ini. Sehingga adanya penelitian ini nantinya diharapkan mampu membantu publik untuk mengetahui apa saja kepentingan Jepang yang signifikan melalui JICA dalam perealisasi proyek ini.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk mengetahui kepentingan Jepang dalam proyek DSDP ini, maka digunakan konsep *Foreign Aid Agency*, Kepentingan Nasional, dan Motif Bantuan Internasional.

FOREIGN AID AGENCY

JICA merupakan agensi pemerintah resmi Jepang dalam pemberian bantuan yang diberikan ke Indonesia khususnya di Bali dalam proyek realisasi DSDP. Konsep *Foreign Aid Agency* merupakan konsep yang penting untuk menjelaskan posisi JICA dalam pemerintah Jepang

Hampir setiap negara maju memiliki *Foreign Aid Agencies*, contohnya Jepang dengan JICA, Amerika Serikat dengan USAID, dan Australia dengan AUSAID. Alokasi dana *Foreign Aid Agencies* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikatakan bervariasi. Walaupun nilai yang digelontorkan untuk dana bantuan dapat dikatakan berjumlah besar, namun alokasi dana untuk *Foreign Aid* hanya bernilai kurang dari 5%, bahkan ada yang kurang dari 1% dari APBN mereka (Rutsch, 2015).

Foreign Aid Agency juga merupakan representasi negara, karena bekerja secara langsung dan berasal dari anggaran resmi negara, bukan swasta layaknya NGO (*Non-Governmental Organization*). Oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh *Foreign Aid Agency* merupakan tindakan resmi atas dari agenda negara yang mencerminkan tujuan tujuan negara.

KEPENTINGAN NASIONAL

Morgenthau menyebutkan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara (Masoed, 1989). Dalam hal ini, pasca perang dunia kedua dan perang dingin, ekonomi merupakan tolak ukur *power* suatu negara. Pasca perang dingin, memang konteks keamanan tradisional telah memudar dan digantikan dengan konsep yang lebih kontemporer, salah satunya ekonomi. Hampir tiap kepentingan nasional suatu negara tidak

jauh dari kepentingan ekonomi, hal ini tentu dapat mempertahankan maupun memperbesar kedudukan suatu negara ditengah area internasional.

Jepang dalam hal ini juga memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Tercapainya kepentingan nasional Jepang sendiri tentunya didukung oleh langkah dan tindakan strategis yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pasca perang dunia kedua, Jepang sudah dilarang memperkuat angkatan militernya, yang menyebabkan, Jepang hanya mengalokasikan 1% dari APBNnya untuk militer. Namun, Jepang melihat sisi lain untuk tetap mempertahankan posisi negaranya sebagai salah satu *leading country* di Asia, yakni dari sisi ekonomi. Jepang kemudian memperkuat perekonomian negaranya dengan menciptakan inovasi teknologi dan memperkuat *bargaining position* dalam hubungan perdagangan internasional. Sehingga, kepentingan Jepang yang pada mulanya ingin menguasai dunia lewat kekuatan militer, telah bergeser menjadi menguasai dunia lewat kekuatan ekonomi (Ariansyah, 2013). Hal ini kemudian menjadi alasan, mengapa Jepang lebih menekankan kerjasama ekonomi ketimbang bentuk kerjasama lainnya, yakni karena arah kepentingan Jepang yang condong kepada kepentingan ekonomi. Sehingga, pemberian bantuan yang termasuk dalam *development cooperation* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nasional Jepang.

MOTIF BANTUAN INTERNASIONAL

Terdapat dua aktor dalam terjadinya hubungan bantuan luar negeri, yakni *donor* dan *recipient*. *Donor* merupakan negara atau organisasi yang memberikan bantuan, sebaliknya *recipient* adalah negara atau organisasi penerima. Namun, tidak bisa dipungkiri, bahwa terjadinya bantuan internasional didasari pada suatu kenyataan, yakni adanya motif dibalik pemberian bantuan. Motif *donor* dalam memberikan bantuan dapat sangat bervariasi dan berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut bergantung pada tujuan dan kepentingan pemberian bantuan.

Menurut Mutaqien (2014) secara sederhana motif donor dalam memberikan bantuan dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

1. Motif Politik, yaitu pemberian bantuan digunakan untuk mendapatkan keuntungan berupa pengaruh secara politik;
2. Motif kemanusiaan, yaitu pemberian bantuan murni didasarkan pada adanya kepedulian dan rasa kemanusiaan dan
3. Motif Ekonomi, yaitu bantuan digunakan donor untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik pada saat itu ataupun dimasa yang akan datang (*Future Economic Advantages*)

Jepang sendiri disebutkan juga memiliki motif dalam pemberian bantuan, adapun M. Mossadeq Bahri (2004) dalam jurnal disertasinya yang berjudul "*International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia.*" menyebutkan bahwa:

Ada 5 yang disebutkan Bahri sebagai tujuan dalam pemberian bantuan:

1. Memacu proses rekonstruksi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jepang
2. Membangun hubungan diplomatik
3. Mempertahankan sistem ekonomi, politik, dan sosial
4. Menstabilkan kebijakan pemerintah negara penerima bantuan untuk menguntungkan pemerintah Jepang
5. Meningkatkan pendapatan perkapita di Jepang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

JICA DAN ODA

ODA merupakan kerangka bantuan resmi yang dimiliki oleh Jepang yang dibuat pasca Colombo Plan tahun 1954. ODA sendiri dijalankan oleh beberapa sub, dimana agensi pemberian bantuan resmi Jepang dibentuk untuk penyaluran ODA yakni JICA. Bantuan yang diberikan oleh ODA Jepang dapat berupa pinjaman maupun hibak. Untuk kasus DSDP sendiri, bentuk bantuan yang digunakan adalah pinjaman dengan bunga rendah.

ODA sendiri bergerak dalam dua bentuk kerjasama, yakni bilateral dan multilateral dibantu oleh 3 institusi yakni MOFA (*Ministry of Foreign Affairs*) dan JBIC (*Japan Bank International Cooperation*) untuk bantuan jenis hibah dan pinjaman, serta JICA untuk kerjasama teknis. Namun dalam perjalanannya, telah terjadi perubahan beberapa kali dalam struktur pemberian bantuan ODA. Untuk DSDP sendiri, JICA berfungsi sebagai penyambung

kerja sama teknis (melakukan penelitian terhadap proyek DSDP) dan menjembatani Indonesia dengan JBIC untuk mendapat bantuan dana. JICA mendapat ototritas tersebut karena, ODA telah mengalami perubahan sehingga JICA bisa membantu suatu negara untuk mendapat bantuan pinjaman.

PERAN JICA PADA PROYEK DSDP

JICA yang merupakan perwakilan Jepang dalam usaha kerjasama teknis membuat sebuah perencanaan dimana didalamnya terisi proyek yang mampu meningkatkan mutu sanitasi di Bali, yang dalam hal ini ialah proyek DSDP. JICA menyiapkan tim ahli yang kemudian bekerja sama dengan pihak konsultan dalam membuat proposal resmi terkait isu perencanaan proyek DSDP. Konsultan proyek yang dipakai oleh JICA merupakan konsultan dari Jepang, yakni IPC (*International Pasific Consultant*). Selain itu JICA juga membuat penawaran berupa bantuan pinjaman lunak, yang mana, JICA disini akan membantu pendanaan proyek ini dengan menghubungkan Indonesia dengan JBIC, karena pada saat itu JICA masih dalam bentuk JICA lama sehingga masih perlu terhubung dengan JBIC untuk urusan penggelontoran dana agar Indonesia mampu memperoleh dana dengan catatan, Indonesia akan diberikan bunga yang sangat rendah dibawah suku bunga rata-rata, yakni di kisaran 2% dalam jangka waktu hingga 20 tahun - 30 tahun (Dirjen Cipta Karya, 2015). Melalui wawancara dengan staf resmi Dirjen Cipta

Karya, proposal ajuan proyek ini selanjutnya diberikan kepada BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk dapat dipertimbangkan. Menurut wawancara, BAPPENAS menilai bahwa proyek sanitasi ini baik untuk dilakukan karena memang sebelumnya belum ada pengolahan limbah sanitasi yang baik di Indonesia, selain itu, dana untuk pengolahan limbah ini cukup besar. Sehingga adanya bantuan dari Jepang yang diinisiasi oleh JICA dengan cara melakukan pemberian bantuan dapat dikatakan sulit untuk ditolak” ketika hal ini memang sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan mutu sanitasi di Indonesia. BAPPENAS kemudian menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera direalisasikan oleh Dirjen Cipta Karya (Dirjen Cipta Karya, 2015).

Bisa dikatakan secara poin besar, JICA melakukan dua hal signifikan, yakni membantu pengadaan proyek DSDP, dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk memperhatikan isu sanitasi yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Lalu yang kedua adalah, menghubungkan Indonesia dengan JBIC mengenai hibah atau pinjaman lunak yang nantinya digunakan sebagai realisasi dari proyek DSDP ini.

REALISASI PROYEK DSDP OLEH PEMERINTAH DAN JICA

Dalam kurun waktu tahun 1992-1996 merupakan masa penelitian JICA, penyerahan proposal JICA kepada BAPPENAS, dan persetujuan atas realisasi proyek DSDP ini. JICA pada dasarnya berdasarkan kebijakan *yosei-shugi*, harus menunggu adanya

permintaan dari negara tujuan untuk merealisasikan suatu proyek bantuan. Dalam wawancara dengan staff Dirjen Cipta Karya (2016), JICA yang mengetahui buruknya sanitasi di Bali, melaporkan hal ini kepada pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan suatu proyek yang mampu memperbaiki sistem sanitasi di Bali. JICA dalam proyek DSDP menjadi penginisiasi atau pemberi *draft* proposal dan pengkaji besaran nilai proyek dan dampak proyek ini. Sehingga yang terjadi ialah, JICA mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan permintaan terhadap proyek sanitasi yang dikatakan telah mendesak ini (Dharmaputera, 2016). Karena desakan ini, kemudian pemerintah Indonesiadihadapkan pada keputusan apakah Indonesia akan merealisasikan proyek ini atau tidak. Namun, karena desakan yang dilakukan JICA juga terdapat ancaman, dimana Jepang akan mematorium wisatawannya ke Indonesia apabila Indonesiatidak segera merealisasikan proyek infrastruktur sanitasi ini, sehingga pada akhirnya pemerintah Indonesia setuju untuk melaksanakan proyek tersebut.

Hal yang dilakukan JICA kemudian ialah, JICA dibantu oleh Konsultan PCI bertugas sebagai peneliti, pengkaji, dan perencana kelayakan suatu proyek sehingga proyek yang akan dikerjakan. Hal yang ingin dipastikan JICA dan konsultan PCI ini ialah, proyek ini tidak melanggar aturan-aturan yang bersinggungan dengan hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

BAPPENAS sendiri berfungsi sebagai peninjau ulang dari apa yang telah dilaporkan

oleh pihak JICA, dan sebagai pemberi persetujuan atau *approval* dari perencanaan tersebut.

Proyek DSDP ini memiliki komposisi pekerja yakni konsultan berasal dari perusahaan Jepang dan pada setiap realisasi proyek DSDP tahap I dan II, terdapat kontraktor Jepang, yaitu Toa Tokura. Adapula kerjasama atau kontraktor gabungan antara kontraktor Jepang dan Indonesia pada DSDP tahap I, yakni Toa Tokura-PP atas arahan dari konsultan terpilih. Juga beberapa kontraktor lokal asal Indonesia seperti Adi Karya, Wika, dan Waskita. Dari segi dana, dana yang dipinjam oleh Indonesia kepada JBIC merupakan dana dalam bentuk YEN, yang kemudian akan dicicil dengan APBN Indonesia menggunakan kurs mata uang rupiah (Dirjen Cipta Karya, 2015).

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS KEPENTINGAN JEPANG MELALUI JICA

Dalam analisis penulis, terdapat 4 hal yang menjadi kepentingan JICA dalam upayanya membantu Indonesia untuk merealisasikan proyek DSDP. 4 hal tersebut diantaranya Tercapainya tujuan pemberian bantuan ODA, Peningkatan mutu kesehatan warga Jepang, Pelatihan tenaga ahli, dan keuntungan ekonomi. Berikut paparan lebih lanjut mengenai 4 hal tersebut.

TERCAPAINYA TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN ODA

Jepang ingin menciptakan suatu iklim kerjasama dimana kerja sama yang dilakukan bukan semata-mata hanya berlangsung dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang. Hal tersebut terungkap pada misi ODA yakni membangun kelanggengan kerjasama dengan negara sahabat Jepang sebagai perwujudan terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan negara sahabat Jepang. Desakan yang dilakukan Jepang terhadap proyek DSDP ini, bukan hanya untuk keuntungan Indonesia semata, namun Jepang ingin menciptakan iklim adanya saling bergantung antar sesama negara.

Menurut Bahri (2004) Jepang menganggap Indonesia sebagai negara penting yang memiliki posisi di Asia Tenggara, selain itu, adanya bantuan tingkat daerah ini membuat Jepang mampu memahami Indonesia hingga *scoop local*, sehingga dalam menjalankan politik luar negerinya, Jepang mampu lebih memahami struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan Indonesia.

PENINGKATAN MUTU KESEHATAN WARGA JEPANG DI BALI

Dari data yang telah dipaparkan, Jepang merupakan pengirim wisatawan aktif ke Bali, selain itu, tingkat investasi Jepang sangat tinggi, yakni terbesar kedua di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015). Investasi yang tinggi menyebabkan tingginya warga negara

Jepang yang tinggal di Indonesia, tidak dipungkiri salah satunya yakni Bali.

Dalam pemaparan resmi JICA dalam website DSDP, Jepang menginginkan adanya lingkungan sehat dan aman bagi warganya yang tinggal dan berlibur ke Bali, sehingga Jepang dapat meminimalisir nilai kekhawatiran terhadap warganya yang aktif melakukan kunjungan ke Bali (DIGILIB AMPL, 2008). Dari hal ini kita dapat melihat, bahwa Jepang memasukkan langkah strategisnya yakni meningkatkan mutu kesehatan warga negaranya, kedalam agenda proyek Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu keuntungan bagi Jepang, karena, Jepang tidak hanya dapat meningkatkan mutu kesehatan warganya, namun sekaligus hal itu dapat didapatkan Jepang secara “cuma- cuma”.

Dikatakan “cuma-cuma” karena bentuk bantuan yang diberikan Jepang ialah peminjaman dana proyek dengan bunga yang sangat rendah. Artinya, walaupun dana yang digelontorkan Jepang untuk proyek ini sangat besar, namun dana ini nantinya akan kembali lagi ke pemerintah Jepang karena terjadi pengembalian dana yang dilakukan Indonesia. Sehingga pada akhirnya, Jepang dapat menerima kembali seluruh dana yang telah mereka gelontorkan untuk proyek ini. Disamping itu, Jepang juga memperoleh keuntungan yakni bunga dari pengembalian hutang yang dilakukan Indonesia. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa bunga yang diberikan sangat rendah hanya berkisar 2% dari total pinjaman sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh karena telah terjadi

penurunan nilai kurs akibat adanya inflasi. Sebaliknya, langkah Jepang dengan melakukan peminjaman dana merupakan langkah strategis, dimana Jepang bisa dikatakan tidak mengeluarkan dana demi mencapai tujuan yang mereka ingin dapatkan (Dirjen Cipta Karya, 2015).

Meskipun wacana terealisasinya proyek ini untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan sanitasi bagi warga Bali, namun, Jepang lebih mengedepankan misi keselamatan warganya yang berlibur maupun tinggal di Bali. Hal ini juga menjadi alasan bagi Jepang dalam menyampaikan desakannya kepada pemerintah Indonesia dalam perealisasi proyek ini. Pada akhirnya, Jepang bersikukuh menginginkan adanya jaminan kesehatan bagi warganya yang baik sedang berlibur maupun yang menetap di Bali, walaupun dapat kita lihat bersama, apa yang Jepang inginkan tentunya lebih membebani pemerintah Indonesia dengan cara membangun infrastruktur yang tidak murah.

PELATIHAN TENAGA AHLI

Proyek DSDP terselenggara melalui adanya penelitian komprehensif yang dilakukan oleh ahli-ahli terkait. JICA dan konsultan-konsultannya bekerja dengan menggunakan tenaga ahli yang dipercaya mampu merealisasikan proyek ini. Sehingga, proyek DSDP ini tidak mampu terlepas dari peranan tenaga-tenaga ahli kiriman dari Jepang yang juga merencanakan *masterplan* dari proyek sanitasi ini.

Adanya kebutuhan terhadap tenaga ahli Jepang menjadikan proyek DSDP ini sebagai salah satu tujuan Jepang untuk melakukan peningkatan mutu tenaga ahli muda Jepang. Menurut salah satu staf Konsultan Yajio yang penulis wawancarai pada tanggal 14 Maret 2016, Gustafellaser (2016) usaha Jepang melalui JICA dalam penyaluran proyek bantuan ini merupakan salah satu bentuk pengasahan kemampuan tenaga ahli muda dari Jepang, pasalnya, Jepang sudah menjadi negara yang matang baik secara pemerintahan maupun infrastruktur. Sehingga, proyek-proyek riil berskala besar di negara itu dapat dikatakan hampir habis. Karena, yang dilakukan Jepang saat ini hanya bersifat *maintenance*, sehingga Jepang membutuhkan proyek besar sebagai langkah pelatihan bagi tenaga muda Jepang.

Pada proyek DSDP ini, tenaga ahli Jepang yang turut dalam proyek ini didominasi oleh tenaga ahli junior dan diawasi oleh tenaga ahli senior. Hal ini turut dibenarkan oleh Gustafellaser bahwa tujuan pelatihan ini memang benar dan salah satu tujuan bantuan proyek yang dilakukan Jepang. Hal ini juga sangat disadari oleh seluruh staf Yajio sendiri, dimana sebagian besar pimpinan proyek merupakan staf ahli muda yang berasal dari Jepang.

JICA menganggap bahwa bantuan teknis yang mereka lakukan dapat mempengaruhi kualitas dari tenaga ahli Jepang di masa depan, sehingga terjadi regenerasi terhadap tenaga ahli Jepang. Hal ini dapat menguntungkan bagi Jepang, mengingat negara tersebut sangat bergantung dengan

tenaga-tenaga ahlinya dalam menciptakan maupun mengembangkan teknologi-teknologi baru yang dapat berguna baik untuk kemajuan negaranya maupun perekonomian bangsanya.

Pelatihan terhadap tenaga ahli junior ini tidak hanya dilakukan pada proyek DSDP saja, hal ini dilakukan kepada seluruh proyek bantuan yang dilakukan oleh JICA. Mengingat banyaknya tipe program yang JICA akan lakukan di Indonesia, tentu saja tenaga ahli yang dikirimkan juga dari berbagai sektor bidang keilmuan. Konsistensi inilah yang meyakinkan alasan ini sebagai alasan kuat mengapa JICA bersikeras merealisasikan proyek ini.

KEUNTUNGAN EKONOMI

Seperti yang sudah dijelaskan dalam tulisan Bahri (2004), pemberian bantuan atau ODA yang dilakukan oleh Jepang merupakan salah satu usaha Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Selain itu hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang berimplikasi pada penguatan kapasitas politisnya di mata internasional. Mengacu pada konsep, keuntungan ekonomi dapat dilihat sebagai bentuk realisasi dari motif ekonomi yang ingin dilakukan oleh Jepang. Jepang melihat adanya keuntungan dari adanya transfer bantuan, sehingga, dana yang dikeluarkan Jepang sesungguhnya dapat berkembang menjadi sumber dana yang jauh lebih besar nilainya. Hal ini bukan sebuah pernyataan semata, melainkan juga terlihat dalam realisasi proyek DSDP.

Tercapainya proyek ini juga didasarkan pada lobi-lobi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Menurut Gustafellaser (2016) Jepang melakukan langkah persuasif dan lobi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah BAPPENAS itu sendiri sebagai peninjau dan pengambil keputusan terhadap pemberian bantuan yang masuk di Indonesia. Didalam lobi tersebut, Jepang yang saat itu merupakan penyumbang wisatawan terbesar di Indonesia khususnya di Bali, menginginkan proyek ini terealisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap Jepang yang warganya banyak yang melakukan aktivitas pariwisata maupun bekerja di Bali. Selain itu, terdapat tawaran tertentu ialah menguntungkan secara terselubung terhadap beberapa hal yang dapat diberi Jepang terhadap pemerintah Indonesia apabila proyek ini dapat di realisasikan. Dengan demikian, Jepang yang sudah menyetorkan proposal penelitian yang dilakukan di Bali, merasa ada urgensi dalam proses perealisasiannya. Di lain pihak, Indonesia juga sangat berminat mendapatkan ODA karena merupakan pinjaman lunak dengan bunga hanya 2% dan jangka waktu cukup lama yakni 20 tahun. Total dari keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam proyek ini terbilang cukup besar, yakni 1 triliun. Akan tetapi, Indonesia yang menganggap pinjaman ini besar sesungguhnya tidak bagi Jepang. Nilai proyek ini sebenarnya tidak seberapa bagi Jepang karena adanya inflasi tiap tahunnya, yang menyebabkan terjadi penurunan nilai dari jumlah uang yang ia gelontorkan. Pada

akhirnya, nilai uang yang diberikan Jepang akan berkurang dan berkurang setiap tahunnya. Oleh karenanya, bunga 2% yang diberikan Jepang sejatinya akan menutupi penurunan itu, dan pada pelunasan proyek, nilai uang Jepang akan kembali pada nilainya semula.

ODA yang diberikan kepada Indonesia meliputi tiga komponen, yaitu bentuk pinjaman, hibah dan kerjasama teknik. Pemerintah Jepang menggunakan JICA sebagai lembaga pelaksana bantuan Jepang dalam bentuk kerjasama teknik, sedangkan bentuk pinjaman atau *loan* dilakukan melalui JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*), yang merupakan penggabungan dua badan kerjasama internasional yaitu OECF (*Overseas Economic Cooperation Fund*) dan EXIM (*Export Import Bank*) (Irsan, 2005). Akhirnya, Pemerintah melalui BAPPENAS menyetujui proyek ini untuk direalisasikan. Kemudian, BAPPENAS menyerahkan proyek ini kepada bidang terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya dikerjakan oleh Dirjen Cipta Karya.

Proyek DSDP merupakan salah satu proyek dimana dalam perencanaan maupun pelaksanaannya sebagian besar dilakukan oleh perusahaan Jepang, baik konsultannya maupun konstruksinya. Konstruksi proyek negara pada umumnya lebih sering melibatkan kontraktor yang berasal dari dalam negeri. Namun pada proyek DSDP, terdapat keterlibatan penting konsultan dan kontraktor yang berasal dari Jepang. Menurut wawancara dengan Sutrisno (2016) pada tanggal 12 Januari 2016, salah satu staf ahli Dirjen Cipta

Karya, JICA dalam proses persuasifnya dalam perencanaan proyek DSDP menyebutkan bahwa, Jepang tidak hanya terlibat dalam perencanaan maupun penelitian, namun juga dalam proyek pelaksanaannya. Hal itu terjadi sebagai salah satu bagian dari tawar-menawar Jepang dengan Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk 'timbang balik' untuk Jepang yang sudah bersedia meminjamkan dana yang cukup besar dengan bunga rendah kepada Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya keterlibatan aktif konsultan dan kontraktor yang berasal dari Jepang.

Dalam penegosiasian, menurut Sutrisno (2016), JICA mengharuskan Indonesia untuk menggunakan konsultan yang berasal dari Jepang. Hal ini merupakan bagian dari lobi yang dilakukan Jepang saat pencahangan proyek ini dengan pemerintah pusat. Meskipun demikian, hal yang dilakukan JICA tidaklah melanggar aturan yang ada di Indonesia. Menurut Perpres 54 Th. 2010, Proyek yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000 konsultannya boleh berasal dari konsultan asing dan proyek bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000, kontraktornya boleh berasal dari kontraktor asing (Sutrisno, 2016). Sehingga, Jepang mampu membuat hal ini terlihat lumrah karena sudah ada peraturan yang mendasari hal tersebut.

Untuk dari pihak konstruksi, Jepang juga meminta agar perusahaan kontraktor yang berasal dari Jepang dapat mengikuti tender yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini dibenarkan oleh Gustafellaser (2016) karena teknologi dalam proyek ini

merupakan salah satu paten yang dimiliki Jepang, sehingga dalam konstruksinya, dibutuhkan tenaga ahli dan kontraktor Jepang dalam proyek ini. Tender dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah adanya hasil penelitian maupun kajian dari pihak konsultan Jepang. Dalam proses tender untuk realisasi DSDP tahap awal, Toa Tokura-PP (Pembangunan Perumahan) menjadi pemenang tender untuk proyek DSDP tahap I. Toa Tokura-PP merupakan kontraktor gabungan antara Toa Tokura (Jepang) dan PP (Indonesia).

Dari 5 negara terbesar pemberi bantuan ke Indonesia, 3 diantaranya, yakni Jepang, Amerika Serikat, dan Cina merupakan pemegang paten teknologi sanitasi yang dipakai didalam proyek DSDP. Sehingga, negara-negara ini tentu akan mengajukan nama pelaksana proyek untuk dapat ikut serta dalam proyek ini. Oleh karena itu, Jepang mengamankan posisinya dengan memanfaatkan nilai tawar yang mereka miliki sebagai pemberi bantuan pinjaman dana. Sehingga Jepang dapat turut serta dalam proyek DSDP ini tanpa memikirkan persaingan dengan kontraktor ataupun konsultan asing lainnya (Dirjen Cipta Karya, 2015).

Selain itu, keterlibatan Jepang dalam proyek ini juga memperkenalkan teknologi Jepang lebih lanjut kepada Indonesia khususnya Bali. Melalui kontraktornya, Jepang kemudian melakukan suplai dari mulai teknologi yang bersifat operasional, hingga teknologi inti dari proyek DSDP ini. Dengan demikian, Jepang tidak hanya memasukkan

untuk pekerja (kontraktor dan konsultan), ia juga memasukkan unsur barang (teknologi) dalam proyek yang akan mereka realisasikan, dalam hal ini DSDP.

Barang-barang yang dipakai merupakan buatan jepang dan perlu digaris bawahi merupakan pembelian yang dilakukan Indonesia untuk proyek DSDP. Menurut Sutrisno (2016), Indonesia sebenarnya memiliki alternatif barang barang lain seperti buatan Denmark yang digunakan pada DSDP tahap II, namun saat kontraktor Jepang memegang proyek DSDP, secara otomatis akan menggunakan barang-barang buatan Jepang. Selain itu, proyek DSDP ini merupakan proyek yang menggunakan teknologi serta paten Jepang. Sehingga yang terjadi ialah, bahan atau teknologi tersebut telah memakan 60% biaya dari keseluruhan total disalurkan kepada kontraktor Jepang. 60% ini mencakup biaya paten, teknologi utama, tenaga ahli utama, konsultan, dan masterplan penyambungan pipa-pipa DSDP. Sehingga yang terjadi adalah Jepang mendapat margin keuntungan yang sangat besar dengan adanya realisasi dari proyek ini

Kontraktor, konsultan, tenaga ahli, maupun barang-barang dan teknologi yang dipakai didalam proyek DSDP ini memang merupakan milik perusahaan swasta Jepang dan bukan perusahaan negeri. Dimana, memang hasil dari penjualan maupun keuntungan yang didapat tidak langsung masuk ke pendapatan Jepang. Namun, Hal ini merupakan salah satu tujuan pemberian bantuan Jepang. Kembali lagi seperti yang

dikatakan oleh Bahri (2014) Jepang melakukan hal ini semata-mata untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya. Dalam konsep disebutkan, Jepang menggunakan bantuan untuk meningkatkan stabilitas ekonominya dan menambah pendapatan perkapitanya. Dengan keikutsertaan kontraktor, konsultan, serta barang-barang yang berasal dari Jepang, otomatis, Jepang juga turut andil dalam meningkatkan pendapat perkapita negaranya. Nilai total proyek yang dibayarkan oleh Indonesia termasuk didalamnya adalah pembayaran tenaga ahli, teknologi, dan lembaga konsultan. Sehingga, dana yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk realisasi proyek ini, sebagian untuk membayarkan nilai pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pihak Jepang oleh tenaga Jepang sendiri.

Walaupun tindakan ini dikatakan sebagai tindakan kecil dalam meningkatkan perkapita, namun Jepang melakukan ini terhadap sebagian besar bantuan yang ia lakukan diseluruh dunia (Bahri, 2004). Sehingga nilai ini kemudian menjadi besar dan memiliki pengaruh. Hal ini dilakukan Jepang untuk mengukuhkan posisinya di mata internasional, dimana nilai kesuksesan sebuah negara dilihat dari pendapatan perkapitanya (World Bank, n.d). Dari pernyataan ini, melalui peningkatan kapasitas ekonomi, Jepang juga ingin mencapai motif politik seperti yang terpapar pada konsep. Karena, adanya peningkatan kapasitas ekonomi, menyebabkan penguatan posisi Jepang pada aspek politik. Jepang yang juga menyadari pentingnya posisi yang mereka miliki, mencoba pertahankannya

karena pada saat ini, kompetisi sengit telah terjadi di negara-negara yang dulunya bukan di level adidaya, sebut saja Cina, India, dan Korea Selatan. Jepang yang dulunya berada diatas angin pada tahun 1960-2000, akhirnya ikut serta dalam kompetisi yang sekarang terjadi dan hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas perekonomiannya, salah satu diantaranya dengan membangun hubungan diplomatis dan kerjasama internasional secara lebih intensif. Melihat Indonesia yang dirasa sebagai poros Asia Tenggara, maka sangat masuk akal apabila Jepang meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Dengan demikian Jepang mampu meningkatkan kapasitas negaranya di wilayah Asia Tenggara. Jepang melakukannya hubungan kerjasaman dengan dasar bantuan, dimana bentuk ini merupakan bentuk yang paling bisa diterima diantara beberapa bentuk usaha lainnya sebut saja intervensi ekonomi, ekspor, dan kerja sama asing. Dengan demikian, dilakukannya bantuan ini membuat Jepang menyadari pentingnya mempertahankan posisi negaranya dengan meningkatkan intensitas hubungan diplomatis dari segi bantuan ke negara-negara yang dirasa memiliki pengaruh, salah satunya Indonesia yang memiliki pengaruh di Asia Tenggara.

Meskipun demikian, kembali lagi pada poin awal, setiap tindakan negara dalam melakukan sesuatu merupakan wujud dari tujuan yang ingin dicapai negara tersebut, tidak terkecuali bagi Jepang dan Indonesia. Kedua negara merasa diuntungkan oleh adanya proyek ini. Terbukti dari terusnya dan masihnya

berjalan proyek ini tanpa banyak kendala maupun isu penolakan. Adapun motif yang Jepang ingin capai melalui proyek ini bagi Indonesia merupakan nilai yang setimpal bagi Indonesia. Dengan disetujuinya realisasi proyek ini, Indonesia sudah sepatutnya siap dengan konsekuensi yang terjadi dari perealisasi proyek ini.

4. KESIMPULAN

JICA yang merupakan penyalur ODA juga tidak serta merta melihat isu ini murni untuk memberikan bantuan dana kepada Indonesia, namun JICA juga melihat adanya kesempatan untuk mencapai beberapa hal yang penting bagi keberlangsungan Jepang sendiri. Dalam realisasi proyek DSDP ini, terdapat 4 hal yang penulis simpulkan menjadi hal yang membuat pemerintah Jepang melalui JICA ingin membantu Indonesia untuk merealisasikan proyek DSDP di Bali. Pertama ialah, proyek ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam mencapai tujuan dari ODA Jepang sendiri. Kedua, Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya yang tinggal di Bali maupun yang berlibur dengan cara meningkatkan kualitas sanitasi dan air di Bali. Ketiga, Jepang menjadikan proyek DSDP sebagai pelatihan bagi tenaga ahli mudanya (tenaga ahli muda Jepang) agar nantinya mendapat ilmu yang lebih besar dan mampu berkontribusi untuk negaranya. Terakhir ialah, Jepang melihat proyek ini sebagai suatu proyek yang dapat berdampak bagi perekonomian nasional Jepang, sehingga Jepang dapat

mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu *leading country* di Asia bahkan di dunia.

Melalui tulisan ini penulis berharap, masyarakat mampu lebih kritis dalam melihat suatu fenomena bantuan, dimana bantuan sering dikaitkan oleh hal hal baik yang dapat diterima suatu negara tanpa tahu maksud dari pemberian bantuan itu. Bantuan merupakan wujud dari adanya hubungan baik yang terjadi diantara dua negara, namun kedepannya, Pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menerima suatu bantuan. Segala bantuan yang masuk ke Indonesia, sudah seharusnya dikalkulasikan dan telah diperhitungkan nilainya. Sehingga yang terjadi ialah, Indonesia dapat menerima suatu bantuan dengan dasar pertimbangan apakah bantuan tersebut sudah memenuhi kepentingan nasional Indonesia sendiri. Pada akhirnya Indonesia diharapkan menjadi negara yang mandiri, yang mampu melaksanakan pembangunan dengan memperkecil nilai bantuan dan hutang, agar Indonesia terlepas dari ketergantungan finansial dan memperkuat posisinya sebagai negara yang turut berperan aktif dalam politik internasional.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Mengingat keterbatasan penulis, sangat memungkinkan apabila penelitian ini dapat dilanjutkan dengan cara menggali lagi motif-motif negara lain yang turut memberi bantuan di Indonesia. Sehingga penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk

melakukan eksplorasi didalam tema besar yang sama.

2. Tulisan ini dapat digali lebih dalam, mengingat penulis hanya mengangkat 4 poin yang menjadi motif Jepang dalam melakukan realisasi bantuan ini. Penulis percaya bahwa masih ada motif lain yang dapat diungkapkan agar dapat melihat kasus ini menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ariansyah (2013). *Kepentingan Nasional Jepang dalam Kemitraan Strategis*

Asean. Diunduh dari: [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/08/Jurnal%20\(arie\)%20fdf%20\(08-28-13-03-52-45\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/08/Jurnal%20(arie)%20fdf%20(08-28-13-03-52-45).pdf)

Ata, P. A. M. (2009). *China-Angola relationship with reference to the construction sector*. Johannesburg: University of Witwatersrand.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Jumlah kedatangan wisman ke Indonesia tahun 2009-2014*. Diunduh dari <http://bali.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1>

Bahri, M. Mossadeq. (2004). *International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia*. MAKARA of Social Sciences and Humanities Series Volume 8 No.1, Depok: Universitas Indonesia.

Brautigam, D. (2008). *China's African aid: transatlantic challenges* [pdf]. Washington DC: GMF.

China's Foreign Aid. (n.d.). *China's foreign aid (white paper)* [pdf]. Diunduh dari http://www.euchina.net/web/cms/upload/pdf/nac_hrichten/2011-04-21Chinas-ForeignAid-WhitePaper.pdf

DIGILIB AMPL. (2008). *DSDP siap dukung pariwisata Bali*. [pdf]. Diunduh dari http://www.digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=1&tp=artikel&ktg=sanitasi&kd_link=&kode=2025

Dinas Pariwisata Daerah. (2006). *Statistik pariwisata Bali*. Diunduh dari: http://www.baliprov.go.id/files/subdomain/dispar_da/ind/file/Statistik%20Pariwisata%20Bali/Statistik%20Pariwisata%20Bali%202006.pdf

Easterly, W. (2003). *Can foreign aid buy growth?* [pdf]. New York University.

Fuller, S. (2002). *A question of motivations: determining why donor countries give aid*. Illinois Wesleyan University.

Gilpin, R. (2001). *Global political economy understanding the international economic order*. Princeton University Press.

Gunawan, Hendar. (2015). *RI masuk peringkat 5 destinasi wisata orang Jepang*. Diunduh dari

<http://internasional.kontan.co.id/news/ri-masuk-peringkat-5-destinasi-wisata-orang-jepang>

Irsan, Abdul. (2005). *Jepang: Politik Domestik, Global dan Regional*, Makassar: Hasanuddin University Press.

ISO. (2015). *ISO 14001 Environmental managements system revisions*. Diunduh dari http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000/iso14001_revision.htm

JICA. (2013). *JICA 2013* [pdf]. Diunduh dari: www.jica.go.jp/english

Keriyasa, Martin Bagya. (2014). *Daftar Negara Pemberi Utang ke Indonesia*.

Diunduh: <http://economy.okezone.com/read/2014/06/17/20/1000302/daftar-negara-pemberi-utang-ke-indonesia>

Klees, S. (2010). *Aid, development, and education: current issues in comparative education*. Diunduh dari: <http://eric.ed.gov/?id=EJ934760>

Leong, B.A.K. (1998). *Indonesia foreign policy: change and continuity amidst a changing environment*. Diunduh dari http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1998/Vol24_2/2.htm

Martens, B. (2004). *Why do aid agency exist?*. Diunduh dari: <https://www.oecd.org/dev/34353531.pdf>

Masoed, M. (1989). *Ilmu hubungan internasional, disiplin dan metodologi*. Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Moravcsik, A. (2010). *Liberal theories of international relations*. Princeton University. Diunduh dari: [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Moravcsik,+A.+\(2010\).+Liberal+theories+of+international+relations.+Princeton+University.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwir-7OkmvjMAhWIro8KHS2uB3IQgQMIGTAA](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Moravcsik,+A.+(2010).+Liberal+theories+of+international+relations.+Princeton+University.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwir-7OkmvjMAhWIro8KHS2uB3IQgQMIGTAA)

Morgenthau, H. J. (1968). *Political theory of foreign aid*. Cambridge University. Diunduh dari: <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8745781&fileId=S003055400077807>

Mutaqien, M. (2014). *Filantropi dan bantuan luar negeri* [video]. Diunduh dari http://web.unair.ac.id/artikel_detail-100167-Bantuan%20Luar%20Negeri%20dan%20Filantropi-Perubahan%20Motif%20Bantuan%20Luar%20Negeri%20Dari%20Perspektif%20Kepentingan%20Donor%20.html

Plano, J. & Olton, R. (1969). *Internasional relation dictionary*. Holt and Winston. New York.

Purnamasari, M. (2004). *ODA Jepang di Indonesia dalam Konteks Hubungan Jepang-Asia Tenggara*. (Skripsi). Universitas Indonesia.

Rutsch, P. (2015). *Guess how much of Uncle Sam's money goes to foreign aid?*. Diunduh dari <http://www.npr.org/goatsandsoda/2015/02/10/383875581/guess-how-much-of-uncle-sams-money-goes-to-foreign-aid-guess-again>

Safitri, H. N. (2014). *Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia dibalik pemberian bantuan lingkungan untuk mengatasi masalah perubahan iklim* (skripsi). Universitas Brawijaya. Diunduh dari https://www.academia.edu/8338906/Kepentingan_Amerika_Serikat_di_Indonesia_dibalik_Pemberian_Bantuan_Lingkungan_Untuk_Mengatasi_Masalah_Perubahan_Iklm

Sardana, Gede. (2011). *Air limbah jadi air bersih di Bali*. Diunduh dari <http://news.detik.com/read/2011/08/10/230847/1701120/10/>

Tuman, J. P., Emmert, C.F., & Sterken, R.E. (2001). *Explaining japanese aid policy in Latin America: a test of competing theories*. *Political Research Quarterly*, 54.1, hal 89.

Worldbank (n.d). *Indikator Keberhasilan Pertumbuhan*. Diunduh dari:Worldbank.com <http://www.informasi-pendidikan.com/2016/02/indikator-keberhasilan-pertumbuhan.html>

Whittemore, Jessica (n.d.). *Cooperation Among States Political Military Economic Alliances*. Diunduh dari: <http://study.com/academy/lesson/cooperation-among-states-political-military-economic-alliances.html>

Wawancara:

Sutrisno, Adi interview. 2016. *Interview peran pemerintah dalam proyek DSDP*. Denpasar

Gustafellaser, Esa interview. 2016. *Interview peran JICA dan Konsultan dalam proyek DSDP*.Denpasar